

BAB IV

KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengapa ASEAN tetap mempertahankan prinsip non-intervensi dalam merespons krisis Rohingya pasca kudeta militer di Myanmar tahun 2021. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa keberlanjutan prinsip non-intervensi tidak dapat dilepaskan dari perkembangan historis norma tersebut sejak awal pembentukan ASEAN. Sejak berdiri, ASEAN dibangun di atas prinsip penghormatan terhadap kedaulatan dan larangan campur tangan dalam urusan domestik negara anggota, yang kemudian menjadi fondasi utama dalam menjaga stabilitas hubungan regional. Norma ini terus dipertahankan karena ASEAN terdiri dari negara-negara dengan latar belakang politik, sistem pemerintahan, dan pengalaman historis yang berbeda, sehingga prinsip non-intervensi dipandang sebagai mekanisme paling aman untuk menjaga kohesi organisasi.

Dalam konteks pasca kudeta militer Myanmar 2021, ASEAN mempertahankan prinsip non-intervensi karena stabilitas kawasan dan penghormatan terhadap kedaulatan negara anggota tetap menjadi pertimbangan utama dalam setiap sikap dan kebijakan organisasi. Berdasarkan analisis terhadap *Chairman's Statements* dan berbagai dokumen resmi ASEAN periode 2021–2025, ditemukan bahwa respons organisasi secara konsisten dibingkai dalam narasi kemanusiaan, stabilitas regional, dan dialog konstruktif. Framing tersebut menempatkan keterlibatan ASEAN pada ranah fasilitatif melalui bantuan

kemanusiaan, mediasi, dan dukungan dialog, tanpa mengarah pada tekanan politik langsung atau tindakan yang dapat dikategorikan sebagai intervensi terhadap urusan domestik Myanmar. Dominasi penggunaan istilah yang berfokus pada bantuan, mitigasi dampak, serta fasilitasi komunikasi menunjukkan bahwa pendekatan ASEAN bukan merupakan bentuk ketidakpedulian terhadap krisis, melainkan pilihan strategis yang tetap berada dalam batas prinsip non-intervensi. Melalui pola bahasa dalam dokumen resmi, prinsip non-intervensi tidak hanya dipertahankan secara normatif, tetapi juga dilegitimasi kembali melalui konstruksi wacana diplomatik yang membatasi ruang tindakan organisasi.

Dalam pendekatan *English School*, respons ASEAN pada krisis Rohingya pasca kudeta militer Myanmar mencerminkan orientasi yang lebih menekankan pada keteraturan (*order*) dibandingkan keadilan (*justice*). Negara-negara anggota ASEAN yang memiliki latar belakang politik, sejarah, dan kepentingan domestik yang beragam cenderung memandang stabilitas hubungan antarnegara sebagai prioritas utama, sehingga intervensi atas dasar nilai universal seperti hak asasi manusia sering dianggap berpotensi mengganggu keseimbangan kawasan. Selain itu, pengalaman historis negara-negara Asia Tenggara yang pernah mengalami kolonialisme dan intervensi eksternal turut membentuk sensitivitas kolektif terhadap isu kedaulatan. Oleh karena itu, mempertahankan prinsip non-intervensi dipandang sebagai cara paling aman bagi ASEAN untuk menjaga stabilitas regional sekaligus mempertahankan kerja sama di antara negara anggota, termasuk dalam menghadapi krisis Rohingya pasca kudeta militer Myanmar 2021.

Untuk mempertegas posisi penelitian, hasil analisis menunjukkan bahwa sikap Association of Southeast Asian Nations yang mempertahankan prinsip non-intervensi dalam merespons krisis Rohingya pasca kudeta militer Myanmar 2021 merupakan pilihan yang tepat dan relevan dalam konteks kerja sama regional Asia Tenggara. Dalam kerangka pluralisme dalam perspektif English School, stabilitas kawasan dan penghormatan terhadap kedaulatan negara anggota merupakan prasyarat utama bagi keberlangsungan hubungan antarnegara, terutama dalam organisasi yang anggotanya memiliki latar belakang politik dan historis yang beragam. Oleh karena itu, penelitian ini secara jelas berpandangan bahwa mempertahankan prinsip non-intervensi merupakan langkah yang rasional dan diperlukan, karena memungkinkan ASEAN menjaga keteraturan regional serta mempertahankan kohesi organisasi agar tetap mampu berfungsi secara efektif sebagai forum kerja sama. Dengan demikian, prinsip non-intervensi tidak diposisikan sebagai bentuk sikap pasif terhadap krisis kemanusiaan, melainkan sebagai strategi normatif yang mendukung stabilitas kawasan dalam jangka panjang.

Secara keseluruhan, jawaban atas rumusan masalah penelitian ini adalah ASEAN mempertahankan prinsip non-intervensi karena prinsip non-intervensi telah terinstitusionalisasi secara historis sebagai fondasi utama kerja sama regional di Asia Tenggara. Sejak awal pembentukannya, ASEAN dibangun di atas norma penghormatan terhadap kedaulatan dan penghindaran campur tangan dalam urusan domestik negara anggota, sehingga prinsip non-intervensi menjadi kerangka dasar dalam mengatur hubungan antarnegara di kawasan. Dalam

praktik kontemporer, norma tersebut juga terus direproduksi melalui konstruksi wacana diplomatik ASEAN yang membingkai respons organisasi dalam narasi kemanusiaan, stabilitas kawasan, dan fasilitasi dialog, sehingga memungkinkan ASEAN tetap terlibat dalam penanganan krisis tanpa secara eksplisit melanggar prinsip non-intervensi. Selain itu, kecenderungan ASEAN yang lebih memprioritaskan pemeliharaan keteraturan kawasan (*order*) dibandingkan penegakan keadilan (*justice*) turut memperkuat keberlanjutan prinsip tersebut. Pengalaman historis negara-negara anggota yang sebagian besar pernah mengalami kolonialisme dan intervensi eksternal juga membentuk sensitivitas kolektif terhadap isu kedaulatan, sehingga intervensi sering dipersepsikan sebagai potensi ancaman terhadap stabilitas domestik dan regional. Oleh karena itu, mempertahankan prinsip non-intervensi dipandang oleh ASEAN sebagai cara paling aman untuk menjaga stabilitas kawasan sekaligus mempertahankan kohesi antarnegara anggota dalam menghadapi krisis regional.

4.2 Saran untuk Penelitian Selanjutnya

Berdasarkan temuan dan keterbatasan penelitian ini, studi selanjutnya disarankan dapat menambahkan wawancara dengan aktor kebijakan yang terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan, seperti diplomat, pejabat kementerian luar negeri negara anggota, serta perwakilan AHA Centre dan AICHR, guna menangkap alasan dan dinamika internal yang tidak sepenuhnya tercermin dalam dokumen resmi. Penelitian lanjutan juga dapat memfokuskan kajian pada efektivitas mekanisme spesifik dalam mengoperasionalkan bantuan kemanusiaan tanpa melanggar prinsip kedaulatan, menggunakan

pendekatan studi kasus dan analisis dokumen yang lebih mendalam. Lebih jauh, eksplorasi dampak kebijakan regional terhadap komunitas terdampak, termasuk pengungsi Rohingya, serta kajian mengenai faktor-faktor yang berpotensi mendorong perubahan norma dalam organisasi regional melalui pendekatan process tracing, akan memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan studi mengenai dinamika non-intervensi dan respons kemanusiaan di tingkat regional.